

Integrasi Etnis Tionghoa dengan Penduduk Lokal di Wonosobo Tahun 1970 sampai 1998

Aldi Hendra Pratama

Universitas Negeri Semarang

Email: Aldihendra0126@students.unnes.ac.id

Abstract. Even though they are dominant in the economic sector, it does not always make it easy for Chinese citizens to survive among local ethnic groups and they must always adapt to various changes in power. This can be seen by the presence of racism entering the Soeharto regime and peaking during the reform period in 1998 which was marked by the amount of violence experienced by the Chinese people. This research is limited temporally, namely from 1970 when development was experiencing very rapid progress during the New Order era until 1998 with the peak event, namely riots and violence experienced by almost all Tonghoa people in Indonesia. Apart from that, the spatial boundary used is Wonosobo City because it is a place for the Chinese community. The aims of this research are (1) to reveal the forms of relations with local communities in the lives of the Chinese people in the 1970s (2) to find out the role played by ethnic Chinese in the development of Wonosobo City during the New Order era (3) to reveal the riots in May 1998 and the racism that occurred happened to Chinese residents in Wonosobo (4) knowing about the efforts made to stop racism that occurred in 1998. Historical research methods were used to obtain data from primary and secondary sources. Primary sources were obtained through archives, newspapers and interviews with related parties. Meanwhile, secondary sources are obtained through literature studies in books, journals, articles and others related to the research topic. Even though during the New Order era there was racism and restrictions on the rights of Chinese citizens. In Wonosobo itself, no significant incidents occurred, including when it peaked in 1998. This is due to the high level of tolerance among religious communities and Wonosobo residents.

Keyword: Chinese, Integration, Racism, Wonosobo

Abstrak. Meskipun dominan di sektor ekonomi, tidak membuat jalan warga Tionghoa selalu mudah untuk bertahan di antara etnis lokal dan mereka harus selalu beradaptasi dengan berbagai perubahan kekuasaan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya Rasisme memasuki rezim Soeharto dan memuncak pada masa reformasi tahun 1998 yang ditandai dengan banyaknya kekerasan yang diterima oleh rakyat Tionghoa. Penelitian ini dibatasi secara temporal yakni dari tahun 1970 dimana pembangunan sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat masa orde baru sampai 1998 dengan adanya peristiwa puncak yakni kerusuhan dan kekerasan yang dialami hampir seluruh masyarakat Tonghoa di Indonesia. Selain itu, batas Spasial yang digunakan adalah Kota Wonosobo karena menjadi salah satu tempat masyarakat Tionghoa. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengungkap bentuk hubungan dengan masyarakat lokal dalam kehidupan rakyat Tionghoa tahun 1970an (2) mengetahui peran yang dilakukan oleh etnis Tionghoa dalam perkembangan Kota Wonosobo pada masa orde baru (3) mengungkap kerusuhan pada Mei 1998 dan rasisme yang terjadi menimpa warga Tionghoa di Wonosobo (4) mengetahui usaha-usaha yang dilakukan untuk menghentikan rasisme yang terjadi tahun 1998. Metode penelitian sejarah digunakan untuk memperoleh data dari sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber primer diperoleh melalui arsip-arsip, surat kabar dan wawancara kepada pihak yang berhubungan. Sedangkan sumber-sumber sekunder diperoleh melalui kajian literatur pada buku, jurnal, artikel dan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Meskipun pada masa orde baru terjadi rasisme dan pembatasan-pembatasan hak warga Tionghoa. Di Wonosobo sendiri tidak terjadi peristiwa yang berarti termasuk ketika memuncak pada tahun 1998. Hal ini dikarenakan rasa toleransi yang tinggi sesama umat beragama dan warga Wonosobo.

Kata kunci : Tionghoa, Integrasi, Rasisme, Wonosobo.

LATAR BELAKANG

Masyarakat Tionghoa sudah berhubungan dalam waktu yang sangat lama dengan orang Jawa khususnya dalam sektor perekonomian. Dalam perkembangannya di wilayah pedalaman kerajaan di Jawa, Tionghoa memperoleh peran yang sangat penting dalam bidang sosial ekonomi. Ketika memasuki periode Islam pedagang Tionghoa semakin bertambah dan bermukim di sekitar pusat kerajaan Mataram Islam yang ada di pedalaman pada abad ke-17.

Orang Tionghoa memiliki peran administratif dan hukum istimewa dalam kedudukannya, hal ini terlihat dengan adanya Syahbandar (pengatur bandar dan bea cukai) khusus untuk pedagang Tionghoa di setiap kota dan pelabuhan perdagangan.

Orang Tionghoa tidak hanya berperan sebagai ahli perdagangan, mereka yang tinggal dekat keraton juga menduduki posisi sebagai pengelola uang kerajaan dan menjadi orang kepercayaan Raja dan Pemerintah Hindia Belanda sehingga tak jarang ada orang Tionghoa yang mampu menduduki posisi Bupati. Contohnya adalah diangkatnya keturunan Tionghoa Cik Go Ing menjadi Bupati Lasem oleh pemerintah Mataram Islam. Selain itu, Pangeran Mangkubumi adik dari Pakubuwono IV memiliki hubungan dengan Si Ting Ho (Kapitan Cina) yang sering datang ke keraton. Di Yogyakarta sendiri juga terdapat hubungan antara Elit Jawa dengan Tionghoa yakni Sultan Hamengkubuwono yang mengangkat Mas Ayu Sumarsonawati yang merupakan keturunan Cina dan ahli jamu-jamuan menjadi dokter pribadinya dan bahkan diperistri (selir) oleh Sultan.

Meskipun demikian, peran Tionghoa yang dominan dan menonjol tersebut juga memperoleh tanggapan buruk dari elite pribumi lain. Sikap sombong tingkah lakunya serta kedudukannya sebagai penyewa tanah memperburuk keadaan. Peran serba salah yang diperoleh masyarakat Tionghoa dari Belanda juga membuat mereka semakin terancam. Pada masa inilah Rasisme atau Xenophobia mulai menyelimuti masa awal perang Jawa. Pusat kerajinan tenun di daerah Kali Lereng terjadi penyerangan sehingga komunitas Tionghoa di Bagelen mengungsi ke Wonosobo.

Selain pada masa sebelum hingga perang Jawa, ternyata rasisme terhadap masyarakat Tionghoa juga kembali terjadi pada masa orde baru. Banyak kebijakan dari pemerintah yang membatasi hak dari masyarakat Tionghoa misalnya tidak diperbolehkannya merayakan hari besar Cina, pemakaian huruf & bahasa Cina yang dibatasi, hingga dilarangnya masuk serta bekerja di lembaga pemerintahan.

Pada awal tahun 1970an, terjadi kerusuhan anti-Tionghoa sebagai akibat dari protes yang dilakukan oleh pedagang lokal kepada pemerintah Orde Baru. Protes tersebut dilakukan karena menganggap sistem Cukong dari Tionghoa tidak memberi keuntungan kepada pedagang lokal. Meskipun demikian, kedudukan masyarakat Tionghoa dapat kembali menguat dalam program pembangunan ekonomi liberal yang dipusatkan oleh Soeharto. Orang Tionghoa direkrut untuk berpartisipasi serta menyukseskan program tersebut. Bahkan dari 100 konglomerat, 79 diantaranya adalah orang Tionghoa yang dimuat dalam majalah *Eksekutif*. Pedagang Tionghoa juga menguasai sekitar 70 persen dalam bidang perdagangan di Indonesia. Dengan kedudukan yang menguat ini khususnya di bidang ekonomi membuat tingkat

kesenjangan antara Tionghoa dengan lokal semakin dalam dan menjadi bibit kerusuhan anti ras.

Melalui kebijakan dari pemerintah, integrasi masyarakat Tionghoa dengan penduduk lokal pun terjadi. Misalnya, dalam hal pendidikan dimana anak Tionghoa bisa belajar di sekolah Indonesia sehingga mereka mengalami proses sosialisasi. Selain itu, pemerintah memberikan tekanan untuk mengganti nama dengan "nama Indonesia" sehingga orang Tionghoa memiliki dua nama dan menjadi asimilasi yang memiliki dampak sangat besar bagi mereka. Dalam bidang agama, Konghucu yang menjadi agama Tionghoa tidak diakui pemerintah pada tahun 1979, padahal agama ini sudah berkembang dan terorganisasi.

Kekerasan yang dialami masyarakat Tionghoa memuncak pada kerusuhan Mei 1998 dan menjadi sasaran dari pergolakan politik saat itu. Peristiwa itu banyak menimbulkan korban jiwa dari masyarakat Tionghoa sebagai akibat dari kesenjangan ekonomi. Sekitar tiga hari sejak 14 Mei 1998 banyak toko yang ditutup, terjadi penjarahan barang dagangan hingga penindasan, pemerkosaan, hingga pembunuhan terhadap etnis Tionghoa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang dijelaskan oleh Kuntowijoyo. Menurut Kuntowijoyo, metode penelitian terdiri dari lima tahap mulai dari pemilihan topik, pengumpulan sumber atau *heuristik*, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi atau penafsiran, dan penulisan hasil penelitian. Dalam pemilihan topik, penulis menggunakan dasar kedekatan emosional karena asal dari penulis adalah kota Wonosobo. Kedekatan intelektual juga digunakan yang didasari oleh pemikiran penulis mengenai keadaan masyarakat Tionghoa di Wonosobo pada masa Orde Baru (1970-1998).

Penulis menggunakan dua sumber yang dikumpulkan (*heuristik*) yakni sumber primer dan sekunder. sumber primer dapat berupa dokumen yang berupa surat-surat dan arsip dari Dinas Catatan Sipil dan Imigrasi tahun 1970an. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber primer wawancara secara langsung terhadap narasumber menggunakan metode sejarah lisan. Sebelum melakukan wawancara, penulis menentukan terlebih dahulu calon narasumber yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian mempersiapkan list pertanyaan dan mulai mengontak calon narasumber. Sesi wawancara dilaksanakan setelah persetujuan dari narasumber dan dilakukan secara terbuka. Sumber sekunder juga digunakan untuk mendukung pernyataan melalui kajian literatur seperti buku dan jurnal yang relevan.

Kritik sumber atau Verifikasi digunakan untuk menguji keautentisitas atau membuktikan keaslian sumber atau dokumen yang didapat dan kredibilitasnya. Kredibilitas

digunakan untuk menguji apakah sumber yang didapat itu bisa dipercaya. Dokumen didapat dari arsip daerah Wonosobo dan berupa surat pernyataan tentang perpindahan penduduk, pergantian nama, dan pernikahan warga Tionghoa tahun 1970an. Hal ini cukup relevan dengan pernyataan narasumber mengenai kedatangan warga Tionghoa ke Wonosobo sehingga dianggap *credible*.

Kemudian penulis melakukan penafsiran atau intepretasi dan sering disebut sebagai permulaan subjektivitas untuk menafsirkan fakta-fakta dari data yang diperoleh. Dalam intepretasi, penulis mencoba menguraikan atau menganalisis data-data yang sudah diperoleh seperti perubahan nama warga Tionghoa pada tahun 1970an dan perpindahan penduduk agar ditemukan suatu fakta. Kemudian tahap sintesis atau penyatuan fakta-fakta data seperti tentang tentang kebijakan orde baru terhadap etnis Tionghoa.

Tahap terakhir yang dilakukan adalah historiografi atau penulisan sejarah dengan menggunakan aspek kronologis sehingga penggunaan angka tahun sangat penting. Penelitian ini disajikan mulai dari latar belakang, hasil penelitian dan kesimpulan. Oleh karena itu, untuk menuliskan sejarah judul "Integrasi Etnis Tionghoa dengan Penduduk Lokal di Wonosobo Tahun 1970 sampai 1998" digunakan sebagai hasil dari penelitian ini.

1. Hubungan etnis Tionghoa dengan Penduduk Lokal di Wonosobo

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya ada sebuah pola hubungan dua individu atau lebih yang saling mempengaruhi dan bersifat dinamis atau yang biasa di namakan dengan interaksi sosial. Interaksi ini terjadi sejak kedatangan awal masyarakat Tionghoa di Wonosobo mulanya melalui daerah Pesisir Pekalongan dan menetap di Kecamatan Batur. Kemudian, mereka mulai menuju ke arah kota Wonosobo yang lebih ramai karena sejak awal tujuan mereka datang adalah berdagang. Karena menemukan sumber potensial untuk berdagang, para Tionghoa pendatang kembali ke daerah asalnya untuk mengajak sanak saudaranya untuk berdagang ke Wonosobo. Bapak Hasan Akli sendiri sebagai narasumber dan salah satu warga Tionghoa juga mengalami pola yang sama.

Beliau merupakan orang Tionghoa yang lahir di Tasikmalaya dan datang ke Wonosobo karena diajak oleh Kakaknya ke Wonosobo tahun 1970 yang bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Karena melihat peluang bisnis baru, sanak saudara yang sebatas lingkungan keluarga diajak ke Wonosobo dan mulai menjalankan bisnis yang bermacam-macam dan juga tidak menetap di satu tempat saja. Pada tahun 1970, Bapak Hasan membuka bisnis di jalan Resimen, kemudian pindah ke Jalan A. Yani pada tahun 1972. Pada tahun 1979, Pak Hasan mulai membuka tokonya sendiri di Jalan Pasar 2 Wonosobo karena sudah mempunyai cukup modal. Pengalaman serupa juga dimungkinkan terjadi juga terhadap warga

lain Tionghoa dalam membuka tokonya di bidang ekonomi perdagangan. Mereka merintis bisnisnya di Wonosobo dengan membuka warung di pedesaan, membuka toko kelontong, toko meubel, tekstil, pedagang keliling dan lain-lain yang memiliki peluang bisnis. Hal ini membuat mereka selalu berinteraksi dengan warga lokal Wonosobo hingga kaum pendatang lainnya. Karena sebagian besar kegiatannya berdagang maka interaksi yang terjadi tidak jauh-jauh dari ekonomi. Berikut adalah daftar warga Tionghoa yang tercatat ataupun mendaftar di Kantor imigrasi Wonosobo pertahun 1970:

Nama	Nomor Surat	Tanggal Pendaftaran	Alamat
Kie Wee Ning	5/Poa/I/1970	17 April 1970	Jl. Banyumas 7 Wonosobo
Liauw Tien Tjoe al. Liauw Keng Shang	7/Poa/I/1970	17 Agustus 1970	Jl. Kawodanan No.29 Wonosobo
Liong Kiem Sang	9/Poa/I/1970	26 September 1970	Jl. Kliwonan No.9 Wonosobo
Tjia Hauw Njan	8/Poa/I/1970	26 September 1970	Jl. Kauman No.- Wonosobo
Tien Fu Lan	10/Poa/I/1970	10 November 1970	Jl. Madya No.18 Wonosobo
Ie Ing Gan	11/Poa/I/1970	19 November 1970	Tosari, Wonosobo

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Wonosobo

(Surat Pendaftaran sebagai Warganegara Indonesia, a.n. Kie Wee Ning, dkk Tahun 1970)

Contoh interaksi yang terjadi adalah hubungan kerja sama antar sesama pedagang ataupun kerja sama antara bos dan pegawai. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan interaksi di bidang lain. Bapak Agung Djarot¹ selaku salah satu narasumber juga menjelaskan bahwa di desa tidak ada perbedaan khusus dalam interaksi antara masyarakat lokal dengan etnis Tionghoa. Warga Tionghoa dianggap sebagai orang biasa dan tidak dibeda-bedakan sehingga dalam kegiatan seperti ronda dan kerja bakti atau gotong royong tetap dilakukan bersama-sama.

Etnis Tionghoa tidak begitu tertarik untuk terjun ke bidang politik karena sejak awal ataupun latar belakangnya lebih diarahkan ke perekonomian. Hal ini didorong oleh kemauan diri sendiri dan arahan dari para orang tua karena ekonomi lebih menjanjikan untuk hidup yang lebih sejahtera. Dalam menjalin hubungan ataupun interaksi dengan penduduk lokal maupun etnis lain, warga Tionghoa dapat dilihat melalui berbagai bidang.

¹ Bapak Agung Djarot merupakan salah satu keturunan Tionghoa yang lahir di Wonosobo, 1 Oktober 1972 dan menetap di Jl. Diponegoro No. 35, Bugangan, Wonosobo serta menjadi salah satu pengurus harian Kelenteng Hok Hoo Bio

2. Pengaruh Kebijakan Orde Baru

Pada masa orde baru, berbagai peraturan dan kebijakan dikeluarkan oleh Soeharto secara khusus untuk warga Tionghoa. Kebijakan ini mengharuskan warga Tionghoa melakukan asimilasi dan berintegrasi secara menyeluruh dengan masyarakat lokal asli di berbagai bidang.

a. Ekonomi

Bidang ekonomi merupakan bagian yang paling didominasi oleh warga Tionghoa sejak zaman nenek moyang. Tujuan utama mereka datang ke Wonosobo juga untuk berdagang dan kemudian timbul interaksi. Pada tahun 1970an, pemerintah mulai menjalankan politik pribumi dan pada tahun 1974 pemerintah mengeluarkan kebijakan penanaman modal asing harus berupa patungan dengan pribumi. Kemudian peraturan Keppres No. 14A/ 1980 dikeluarkan untuk memberi keistimewaan terhadap pedagang dan pemborong pribumi. Namun, banyak nonpribumi seperti Tionghoa yang telah bekerjasama dengan orang lokal sehingga peraturan ini tidak mengubah dominasi Tionghoa terhadap perekonomian pada masa itu. Untuk warga Tionghoa yang pindahan ke Wonosobo sendiri juga tidak terlalu terpengaruh oleh kebijakan ini. Mereka datang ke Wonosobo dengan berbekal modal masing-masing dan mulai merintis usahanya dari nol. Kebanyakan juga memulai dengan berdagang kecil-kecilan seperti membuka warung, toko kelontong dan yang lainnya. Hal ini terjadi atas inisiatif mereka sendiri dan seperti tidak ada campur tangan pemerintah baik dalam arah penempatan ataupun modal. Meskipun, 70 persen kedudukan ekonomi nonpribumi dipegang oleh Tionghoa dan pemerintah mengarahkan orang Tionghoa dalam bidang ekonomi.

b. Politik

Pada masa orde baru, pemerintah melarang segala bentuk organisasi politik Tionghoa sebagai bentuk penerapan dari konsep baru "nation building" yang dianut Soeharto. Pelarangan ini beralasan bahwa organisasi politik Tionghoa terlalu eksklusif atau khusus sehingga Pemerintah memandang bahwa Tionghoa harus bergabung dengan ormas dengan dominasi pribumi agar bisa berasimilasi. Meskipun berlatar belakang ekonomi, ternyata ada sebagian kecil Tionghoa yang tertarik terhadap bidang politik. Diantaranya adalah Jusuf Wanandi/Liem Bian Kie dan Harry Tjan Silalahi yang bergabung dengan kelompok asimilatif Golkar. Djoko Sujatmiko/Lie Giok Hauw menjadi perwakilan Golkar di anggota DPR dan Budi Dipojuwono/Lie Po Yoe menjadi wakil PNI, sedangkan perwakilan PDI Kwik Kian Gie gagal menjadi anggota tahun 1987. Meskipun demikian, sejak tahun 1966 tidak ada orang Tionghoa yang diangkat menjadi menteri kabinet kecuali Menteri Tionghoa Mohammad Bob Hasan/The

Kian Seng. Dia merupakan teman *konco* bekas presiden dan hanya menjabat selama satu bulan pada Maret 1998 dalam kabinet Soeharto yang terakhir.

Ternyata dominasi Tionghoa dibidang ekonomi dimanfaatkan oleh para penguasa dan elit politik dan lebih mudah menguasai minoritas Tionghoa. Para pengamat politik juga berpendapat bahwa warga Tionghoa sengaja dibatasi agar mereka mudah dijadikan target untuk diperas ataupun dipersalahkan ketika ada masalah yang berhubungan dengan ekonomi. Namun, berbeda kasusnya dengan warga Tionghoa yang ada di Wonosobo. Sebagian besar tujuan utama mereka memang berdagang dan menggunakan modal yang relatif kecil sehingga mereka tidak begitu dilirik untuk diperas. Para Tionghoa pendatang juga tidak tertarik dengan dunia politik di Wonosobo karena bukan ranahnya sehingga mereka lebih memilih menjadi orang biasa dan membuka usaha.

c. Sosial

Sejak Soeharto berkuasa, kebijakan untuk melakukan asimilasi secara menyeluruh telah digaungkan meskipun sering kali terjadi pemilahan sehingga menghambat persatuan etnis dimana warga Tionghoa terasingkan dari komunitas tuan rumah. Warga keturunan Tionghoa tetap mengalami deskriminasi karena latar belakangnya sehingga dalam berasimilasi mereka mengupayakan untuk beradaptasi dengan peraturan pemerintah. Kebijakan yang dinilai paling efektif adalah mengubah nama atau identitas dengan menggunakan nama non-Tionghoa yang telah diberlakukan sejak tahun 1966.

Sebagian besar warga Tionghoa mengganti nama mereka untuk bukti pengidentifikasi diri sebagai bangsa Indonesia. Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) harus dimiliki sebagai tanda pengenalan sebagai legalitas dan diperuntukkan ke warga Tionghoa. SBKRI digunakan layaknya paspor dan menjadi dokumen wajib dimiliki anak keturunan Tionghoa yang sudah beranjak 18 tahun ataupun sudah menikah. Bahkan di Wonosobo, anak-anak yang belum berusia lima tahun pun sudah didaftarkan. Diantaranya adalah Jioe Kiem Seng dengan akta kelahiran bertanggal 27 Desember 1960 dan didaftarkan pada 25 Oktober 1962. Jioe Boen Siong dengan akta kelahiran bertanggal 24 Oktober 1962 dan didaftarkan pada 9 September 1964. Jioe Soei Siong yang lahir pada tanggal 31 Desember 1964 dan didaftarkan pada 21 Desember 1966.

Dalam surat dari Kantor Catatan Sipil Magelang kepada Pengawas Catatan Sipil Wonosobo No. Tjs.B.39/92/70 menerangkan pergantian nama salah seorang Tionghoa yang bernama Giam Ka Hong pada tanggal 1 Juni 1970. Dalam surat itu menjelaskan keinginan mengganti nama keluarga Giam menjadi "Handaja" dan nama kecil Ka Hong menjadi "Soetedja". Selain pergantian nama, dalam bidang sosial juga terjadi seperti deskriminasi

dalam pernikahan. Karena pada masa orde baru hanya mengakui lima agama yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha. Oleh karena itu, warga Tionghoa yang beragama Konghucu sebagian besar mencatat dirinya beragama lain meskipun pemberkatan dilakukan di kelenteng agar pernikahan diakui oleh negara.

Hal ini mengakibatkan intensitas pernikahan Tionghoa menurun pada masa orde baru. Meskipun demikian, dengan berlatarkan suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak keluarga dan kekangan dari pemerintah warga Tionghoa tetap bebas untuk menikah. Bahkan terjadi pernikahan antar etnis pasangan Cahyadi Irawan seorang warga Wonosobo (Jl. Madia No. 15 Wonosobo dengan Lim May Hua yang beralamatkan di Gang Kerukunan I No.23 Karangdawa Timur Cirebon. Cahyadi Irawan merupakan seorang pedagang tembakau yang menggeluti pekerjaan seperti ayahnya, Tirta Wiratno dan melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 September 1970.

d. Pendidikan

Sebenarnya sejak sebelum tahun 1958 telah ada sekolah khusus Tionghoa yang berjumlah 2000 buah dan pada tahun 1957 pemerintah melarang warga Indonesia sekolah disana karena dianggap pro-Taipei dan pro-Beijing. Sekolah Tionghoa yang berhubungan dengan Taipei ditutup karena pemerintah Taipei dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI Semesta. Kemudian pada tahun 1965 juga dilakukan penutupan terhadap sekolah Tionghoa yang pro Beijing karena dianggap melakukan kudeta bersamaan dengan peristiwa G 30/S PKI.

Sekolah sebagai salah satu pilar keberadaan dan identitas kultural keturunan Tionghoa dihilangkan pada masa Soeharto sebagai upaya kebijakan asimilasi. Sekolah di Wonosobo yang menjadi tempat untuk berbagai kalangan diantaranya adalah TK&SD Pius dari yayasan Asti Dharma dan SMP Bhakti Mulia. Pada tahun SD Pius terjadi pluralisme pada siswanya yang dari berbagai kalangan. Meskipun berasal dari yayasan Katholik, namun di SD Pius juga terdapat berbagai penganut agama lain termasuk islam dan tidak hanya berisi Tionghoa saja.

e. Bahasa

Warga Tionghoa merupakan masyarakat dwibahasa yang menggunakan bahasa Mandarin selain Bahasa Indonesia. Namun saat orde baru, untuk mendukung upaya asimilasi dari pemerintah maka penggunaan Bahasa Cina dibatasi dan mulai dilarang dengan dikeluarkannya SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/1978 tentang pelarangan Impor, penjualan, dan berbahasa Cina. Ternyata pembatasan ini sudah dimulai sejak tahun 1968 dalam Sekolah Nasional Proyek Khusus dimana bahasa pengantarnya seperti sekolah nasional lain dan bahasa Tionghoa hanya diajarkan di luar waktu sekolah. Sekolah ini tutup

tahun 1975 dan untuk mengajarkan anak-anak belajar bahasa Tionghoa, para orang tua menghadirkan guru les untuk mereka.

Dalam kehidupan sehari-hari juga tidak diperbolehkan menggunakan bahasa dan tulisan Mandarin karena dapat dicurigai sebagai PKI. Kebijakan pelarangan ini tidak begitu berpengaruh terhadap warga Tionghoa di Wonosobo. Tingginya toleransi dan cepatnya adaptasi masyarakat Tionghoa sebagai pendatang dapat memperkecil peluang gesekan rasisme. Mereka hanya belajar bahasa dan berbicara Mandarin dengan sesama etnis Tionghoa, itupun hanya untuk hal tertentu. Karena nasionalisasi, pengaruh lingkungan, dan materi yang diajarkan di sekolah akhirnya warga Tionghoa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia.

f. Kegamaan

Orang Tionghoa pada umumnya memeluk agama Konghucu dan Penpres No. 1/1965 sebenarnya sudah mengakui enam agama di Indonesia yaitu Islam, Protestan, Khatolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Di Wonosobo sendiri terdapat pusat agama penganut Tri Dharma yakni Kelenteng Hok Hoo Bio. Kelenteng ini didirikan pada tanggal 30 Mei 1950 dan digunakan untuk menampung umat beribadah. Namun pada tahun 1979, pemerintah mengeluarkan sebuah instruksi dan menyatakan bahwa agama Konghucu tidak lagi diakui sebagai agama resmi. Jumlah penganut Konghucu sekitar 0,8 persen dari jumlah penduduk Tionghoa di Indonesia 3 persen pada tahun 1970an. Maka dari itu, meskipun tidak diakui kegiatan keagamaan tidak dilarang namun harus dilakukan secara tertutup.

Pada tahun 1980an, di Wonosobo sudah ada Paguyuban Lintas Agama yang terdiri dari pemuda Kristen, Katholik, Islam, dan Konghucu. Karena ada paguyuban ini sebagai wadah berbagai umat beragama sehingga membangun sebuah rasa toleransi yang tinggi dan menyampingkan etnis. Semua saling bahu-membahu untuk bekerjasama dan saling menjaga sebagai bentuk rasa persaudaraan. Sehingga pada puncak kerusuhan Mei 1998 tidak ada suatu peristiwa rasisme yang memilukan terjadi di Wonosobo. Hal karena sudah terbiasa dengan bertoleransi lintas agama maka tidak ada yang ikut-ikutan sehingga di Wonosobo cenderung damai.

g. Kebudayaan

Sebagai warga pendatang, warga Tionghoa memiliki kebudayaannya sendiri dari daerah asal. Dalam berbagai kegiatan keagamaan biasanya diadakan sebuah perayaan hari-hari besar dan diiringi berbagai macam pertunjukkan seperti Barongsai dan Liong. Sejak masa orde baru, berbagai aktivitas budaya yang berbau Tionghoa dibatasi dan dilarang ditampilkan di depan umum. Untuk menyesuaikan kebijakan itu, mereka pun mampu menahan selama 30 tahun untuk tidak mempelajari kebudayaan leluhurnya demi keselamatan diri dan

keturunannya. Semenjak pelarangan itu, kegiatan yang bercorak Tionghoa seperti kirab dan pertunjukan Barongsai di Kelenteng Hok Hoo Bio di nonaktifkan. Namun kegiatan keagamaan tetap dapat dilakukan selama tidak digunakan untuk kepentingan lain seperti politik.

3. Kerusuhan Mei 1998

Kerusuhan Mei 1998 merupakan puncak dari sentimen etnis berupa kekerasan sebagai hasil dari deskriminasi yang telah di pupuk oleh pemerintah orde baru kepada Tionghoa. Di Jakarta, Tim Gabungan Pencari Fakta(TGPF) dalam laporan bab IV mencatat bahwa ada 1.190 korban jiwa yang terbakar, 27 korban akibat senjata, 91 korban luka-luka. Polda mencatat ada sekitar 451 orang meninggal dan Kodam mencatat 463 korban meninggal termasuk aparat serta 69 korban luka-luka. Selain itu, kekerasan seksual juga pada wanita Tionghoa, kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta dibagi ke dalam 3 kelompok oleh TGPF yakni korban perkosaan yang berjumlah 14 orang, 10 korban penyerangan dan dianiaya seksual, dan 9 korban pelecehan seksual.

Selain di Jakarta, kerusuhan juga terjadi di Surakarta dan menjadi salah satu kerusuhan terbesar yang terjadi di Indonesia. Warga Tionghoa disana juga mengalami berbagai permasalahan dalam bentuk kekerasan dan banyak kerugian seperti di Jakarta. Pada waktu itu terdapat 33 korban jiwa terbakar di dalam toko, banyak korban luka-luka dan puluhan toko-toko, mall, plasa milik Tionghoa yang dijarah dan dibakar. Selain itu, kekerasan seksual juga dialami oleh perempuan Tionghoa dan membekas mengakibatkan trauma yang mendalam bagi korban. Peristiwa kekerasan yang dialami ini disebabkan oleh deskriminasi pemerintah orde baru terhadap warga Tionghoa. Tidak adanya hukum yang melindungi hak dari warga Tionghoa menjadikan orang pribumi dengan mudah melakukan kekerasan di Surakarta.

Latar Belakang Kerusuhan

Kerusuhan Mei 1998 dilatarbelakangi oleh gejolak situasi ekonomi Asia Tenggara yang tidak menentu pada bulan Juli 1997 dan mengakibatkan krisis ekonomi. Pemerintah Indonesia mencoba untuk menjaga nilai Rupiah namun tidak berhasil. Pada tanggal 13 Agustus 1997 nilai tukar rupiah berada di titik Rp. 2682,- per dolar AS. Namun nilainya kian anjlok hingga ke titik Rp. 400,- per dolar AS sehingga krisis ekonomi pun tidak dapat dihindari. Adanya krisis ekonomi ini mengakibatkan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Kehilangan pekerjaan dan harga barang yang semakin melambung mengakibatkan keadaan rakyat memburuk.

Keadaan tersebut menimbulkan respon dari mahasiswa Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada membuat aksi kepedulian. Pada mulanya aksi ini dilakukan di kampus masing-masing seperti mahasiswa Institut Teknologi Bandung

yang berjumlah sekitar 500 orang menuntut agar krisis ekonomi diselesaikan. Selain itu, mahasiswa juga menuntut untuk menurunkan harga barang, menghapuskan monopoli ekonomi, pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan meminta Soeharto mengundurkan diri. Namun, karena merasa tidak diperhatikan mahasiswa pun melakukan aksi di luar kampus.

Namun ternyata Soeharto mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar sebelum berangkat ke Mesir untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Hal ini membuat Jakarta kian memanas dan satu hari sebelum peristiwa memuncak terjadi penembakan terhadap empat mahasiswa Trisakti. Mahasiswa tersebut adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidhin Alifidin Koyan, Heri Hartanto, dan Hendrawan Lie. Puncaknya pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan akibat ribuan mahasiswa dicegat untuk menghadiri pemakaman.

Kerusuhan mulai menyasar ke toko-toko dan Tionghoa dimana tempat mereka dijarah, dirusak, dan dibakar. Orang Tionghoa menjadi target penyerangan karena menganggap mereka sebagai kaki tangan Soeharto. Anggapan itu dilatarbelakangi melalui dominasi warga Tionghoa dalam bidang ekonomi. Karena masa orde baru juga mendeskriminasi orang Tionghoa, maka mereka dapat dijadikan sebagai kambinghitam dalam krisis ekonomi yang dialami. Krisis identitas yang dialami oleh warga Tionghoa dan rasa tidak puas masyarakat akan ketimpangan ekonomi yang terjadi mengakibatkan Tionghoa menjadi sasaran dan kekecewaan masyarakat.

Saat mendengar berita kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan sekitar Surakarta, suasana pada saat itu cukup mencekam. Warga Tionghoa di Wonosobo berada diambang ketakutan akan mengalami kejadian yang serupa. Merekapun mulai membatasi aktivitasnya di luar dan menutup toko-tokonya untuk berdiam diri di rumah mengamankan diri sendiri dan keluarga.

Namun ternyata, gelombang kerusuhan tersebut tidak sampai ke Wonosobo dan keamanan dapat terjaga. Warga Tionghoa dapat bernapas lega karena warga masyarakat Wonosobo memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi. Mereka saling bahu-membahu mengamankan warga Tionghoa untuk mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan. Pada masa-masa yang cukup memanas itu, mereka saling menjaga keamanan dengan melakukan siskamling dan ronda.

Selain itu, keagamaan dan kemasyarakatan di Wonosobo cukup kental sehingga melalui Paguyuban Lintas Agama mereka mengesampingkan masalah etnisitas. Pluralitas di Wonosobo juga terjaga tanpa membedakan ras, agama, dan keturunan. Hal ini juga dapat terjadi karena asimilasi yang terjadi antara etnis Tionghoa dan warga lokal sehingga mereka sudah terbiasa dan tidak mudah terbawa oleh pengaruh rasisme luar daerah.

Akhir Kerusuhan

Etnis Tionghoa dapat bernafas lega setelah pengunduran Soeharto sebagai presiden dan terjadi peristiwa reformasi. Pemimpin yang baru yakni Abdurrahman Wahid mulai menghapuskan deskriminasi ras yang terjadi. Dia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 untuk mencabut Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 yang melarang Tionghoa menggunakan kebudayaannya. Akhirnya etnis Tionghoa dapat mengekspresikan kebudayaannya seperti menyelenggarakan kegiatan keagamaan dan adat dari Tionghoa tanpa persyaratan khusus. Surat Bukti Kebangsaan Republik Indonesia (SBKRI) juga sudah tidak terlalu dipermasalahkan sebagai identitas. Keterbukaan pemerintah kota Surakarta juga sudah mulai tidak membedakan etnis dan golongan.

Dampak dari kebijakan ini juga dirasakan oleh masyarakat Tionghoa Wonosobo dimana mereka merasa lebih aman. Sejak Gus Dur menjabat presiden, kegiatan keagamaan di kelenteng Hok Hoo Bio mulai dilaksanakan tanpa kekhawatiran dan lebih terbuka. Warga Tionghoa sudah bisa hidup dengan tenang tanpa khawatir rasisme dan kembali ke kegiatan mereka masing-masing. Upacara keagamaan seperti imlek, kirab, dan pertunjukkan khas Tionghoa juga dapat dipentaskan dimuka umum.

PENUTUP

KESIMPULAN

Pada umumnya, etnis Tionghoa yang ada di Wonosobo merupakan warga pendatang yang kemudian berinteraksi dengan penduduk lokal Wonosobo. Mereka mulanya datang dari pesisir Pekalongan dan membuat tempat tinggal di Batur. Mereka datang ke Wonosobo untuk berdagang dan membuka usaha atau bisnis dengan mengajak sanak saudara. Mereka merintis bisnisnya di Wonosobo dengan membuka warung di pedesaan, membuka toko kelontong, toko meubel, tekstil, hingga menjadi pedagang keliling. Selama berada di Wonosobo, warga Tionghoa juga melakukan interaksi dengan masyarakat lokal demi menunjang kehidupannya. Asimilasi diberbagai bidang juga tampak, terlebih lagi pada masa orde baru yang mengharuskan warga Tionghoa melakukan asimilasi secara penuh diberbagai bidang. Dibidang ekonomi, pemerintah mencoba meningkatkan perekonomian pribumi dengan mengeluarkan peraturan yang membatasi Tionghoa. Namun, sebagian besar pedagang Tionghoa di Wonosobo adalah orang kecil sehingga kebijakan itu tidak terlalu berpengaruh. Dibidang politik, etnis Tionghoa dilarang masuk pemerintahan dan dominasi mereka di ekonomi dimanfaatkan oleh penguasa. Dibidang sosial, banyak warga Tionghoa dideskriminasi dan dianggap sebagai orang asing sehingga pemerintah menggunakan SBKRI sebagai identitas selain KTP.

Dibidang pendidikan, warga Tionghoa dibatasi dalam penggunaan bahasa mandarin dan hanya dapat sekolah di sekolah nasional dan bercampur dengan berbagai etnis. Dibidang bahasa, penggunaan bahasa mandarin dilarang agar mereka tidak terlihat eksklusif dan lebih berasimilasi. Dibidang keagamaan juga dibatasi dan agama Konghucu tidak diakui negara namun tidak dilarang. Terakhir dibidang kebudayaan dimana pada masa orde baru segala kebudayaan yang bercorak Tionghoa dilarang ditampilkan dimuka umum. Meskipun banyaknya peraturan yang cukup mengekang etnis Tionghoa, di Wonosobo sendiri tidak terlalu berpengaruh tekecuali seperti di bidang sosial yang mengharuskan mendaftar SBKRI dan pembatasan dibidang keagamaan dan kebudayaan. Hal ini dikarenakan warga Tionghoa di Wonosobo merupakan rakyat biasa dan tingginya toleransi antar etnis ataupun umat beragama di Wonosobo. Hal ini juga dapat menghindarkan mereka dari kekerasan dan kerusuhan yang memuncak pada tahun 1998. Dalam melewati masa krisis itu, warga Tionghoa dan masyarakat lokal bahu membahu menjaga ketertiban dan menghindari pertikaian. Alhasil mereka dapat melewati masa itu sampai terjadinya reformasi dan hak-hak dari Tionghoa sebagai warga negara pun dikembalikan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku :

- Carey, Peter. 2015. *Orang Cina, Bandar Tol, Candu, & Perang Jawa Perubahan Presepsi Tenang Cina 1755-1825*. Depok: Komunitas Bambu
- Hanik, Umi. 2019. *Interaksi Sosial Masyarakat Plural Agama*. Yogyakarta: CV Penerbit Kutub
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah Edisi Baru*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana

Sumber Jurnal :

- Suryadinata, Leo. 1999. *Jurnal Negara dan Minoritas Tionghoa di Wonosobo*. Jurnal Wacana, Vol. 1, No. 2.
- Suryadinata, Leo. 2003. *Jurnal Kebijakan Negara Indonesia terhadap etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?*. Jurnal Antropologi Indonesia 71 : Institute of Southeast Asians Studies
- Prasetya, Wastu Hari. 2016. *Artikel Kedudukan Masyarakat Tionghoa Dalam Lingkaran Birokrasi Pemerintahan Jawa Abad ke-18 sampai Awal Abad ke-29*. Yogyakarta: FIB UGM
- Faisal, Amir. 2019. *Skripsi Dinamika Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa dengan Jawa di Kecamatan Welahan dari Masa Orde Baru Sampai Dengan Reformasi*. Semarang: FIS UNNES
- Farabi, Al. 2010. *Jurnal Wacana dan Stigma Etnis Tionghoa di Indonesia*. Bengkulu: FISIP Universitas Bengkulu jurnal An-Nida-Vol. 3 No. 01
- Putro, Rizki Aryono & Hartono Hadiwasito. 2013. *Sejarah dan Perkembangan Kampung Pecinan di Kota Madiun Masa Orde Lama Hingga Revormasi (Studi Sosial Ekonomi)*. Madiun: IKIP PGRI Madiun

- Anggani, Woro Pri. 2013. *Skripsi Perkembangan Kelenteng Hok Hoo Bio (福和庙) Wonosobo Tahun 1950 Sampai Tahun 2012*. Yogyakarta: Sekolah Vokasi UGM
- Nurchayyo, Daud Ade. 2016. *Skripsi Kebijakan Masa Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Iskandar, Jason. 2014. *Skripsi Pemuda Etnis Tionghoa & Konstruksi Atas Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta*. Yogyakarta: UGM
- Adi, Yustia Atsanatrilova. 2015. *Tesis Potret Pribumi Dalam Konstruksi Sosial Warga Etnis Surakarta Pasca Kerusuhan Mei 1998*. Yogyakarta: UGM